MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
JL. PALAPA No. 16 A OEBOBO ; Telp. : (0380) 8430117 ;
Web : ptun-kupang.go.id ; E-mail : info@ptun-kupang.go.id
K U P A N G – NTT

NOTULA

Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang nomor: 987/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026 tanggal 29 Juli 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Hari : Jumat

Tanggal : 21 Agustus 2026

Pukul : 10:30 – 11:30

Tempat : Media center PTUN Kupang

Acara : Rapat Monev Zona Integritas Area IV PTUN Kupang

Peserta : Koordinator dan Anggota Tim Zona Integritas Area IV PTUN Kupang

Jalannya kegiatan

Kegiatan di buka oleh Koordinator Tim Zona Integritas Area IV Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

Rapat membahas kesiapan pemenuhan Data Dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas Area IV – Penguatan Akuntabilitas, meliputi kelengkapan dokumen pendukung setiap indikator, status ketersediaan dokumen, serta penyusunan timeline tindak lanjut.

1. Indikator 4.1 – Keterlibatan Pimpinan

Pembahasan:

Evaluasi keterlibatan pimpinan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja.

Data dukung:

- Rapat SAKIP dengan keterlibatan pimpinan.
- Reviu Renstra.
- Dokumen kebijakan akuntabilitas.
- Dokumentasi dan bukti kehadiran pimpinan.

Tindak lanjut:

Melengkapi notulen, dokumentasi, dan arsip bukti dukung kegiatan.

2. Indikator 4.2 – Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Pembahasan meliputi:

- Dokumen perencanaan kinerja (Renstra, RKT, PK, IKU, Rencana Aksi).
- Kesesuaian sasaran, indikator, target dan capaian kinerja.
- Penyusunan dan evaluasi LKjIP.
- Pemanfaatan sistem informasi kinerja.
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola akuntabilitas.

Tindak lanjut:

Melakukan pengecekan konsistensi dokumen serta melengkapi eviden yang belum tersedia.

C. Timeline Agenda Area IV Tahun 2026

1. Desember Minggu IV/Januari Minggu I: Rapat Perencanaan SAKIP Terpadu 2026.
2. Januari Minggu II: Finalisasi dan Penetapan Dokumen Perencanaan SAKIP.
3. Februari Minggu I-III: Penyelesaian LKjIP 2025 dan tindak lanjut LHE.
4. April Minggu I-II: Monev Triwulan I.
5. Juli Minggu I-II:Monev Triwulan II/Semester I.
6. Oktober Minggu I-II: Monev Triwulan III.
7. November Minggu II-III: Penyusunan Rencana Kinerja 2027.
8. Desember Minggu II: Proyeksi Kinerja Akhir Tahun.
9. Desember Minggu IV: Monev Triwulan IV dan Evaluasi Akhir Tahun.